

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara geografis, istilah *Indo – Pacific* atau Indo – Pasifik merujuk pada area luas terbentang dari Samudra Hindia hingga bagian barat dan tengah Samudra Pasifik, yang didalamnya mencakup negara – negara pantai di sepanjang Timur Afrika, Rusia, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia, dan Amerika Serikat. *World Wide Fund (WWF) dan Nature Conservancy* membagi Indo – Pasifik menjadi tiga area bagian yaitu Indo – Pasifik Tengah, Indo – Pasifik Timur, dan Indo Pasifik Barat. Indo Pasifik Tengah mencakup sejumlah laut dan selat yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, termasuk lautan di sekitar kepulauan Indonesia, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Filipina. Selanjutnya, Indo Pasifik Timur mencakup wilayah di sekitar kepulauan vulkanik Samudra Pasifik, terbentang dari Kepulauan Marshall hingga Hawaii. Dan yang terakhir, Indo Pasifik Barat ini meliputi bagian barat dan tengah Samudra Hindia, termasuk pantai timur Afrika, Laut Merah, Teluk Persia, dan Teluk Bengal, hingga perairan di sekitar Madagaskar, Maladewa, dan Kepulauan Chagos (Herindrasti, 2019).

Konsep Indo – Pasifik dianggap sebagai transformasi dari konsep Asia – Pasifik yang merupakan istilah dari wacana geopolitik baru di kawasan tersebut. Meskipun secara geografis serupa, transformasi konsep baru wacana geo – strategis dari Asia –

Pasifik menjadi Indo – Pasifik sejatinya memiliki perbedaan yang cukup fundamental. Abhijit Singh dalam (idsa.in) yang merupakan seorang maritim professional asal India, memaparkan bahwa konsep Asia – Pasifik lebih fokus pada aspek ekonomi dan negara India tidak termasuk dalam konsep ini, sedangkan konsep Indo – Pasifik menggabungkan Samudra Hindia dan Pasifik serta menyoroti pergeseran kekuatan dari Barat ke Timur. Hal ini berarti bahwa Indo – Pasifik merupakan domain strategis yang banyak melibatkan kerjasama maritim, kegiatan ekonomi dan keamanan laut.

Sejatinya istilah Indo – Pasifik telah muncul sejak abad ke – 19, hal ini didasarkan pada prespektif Alferd Thayer Mahan dalam karyanya yang berjudul “*The Influence of Sea Power History: 1660 – 1783*” yang terbit pada tahun 1890. Mahan menyajikan wawasan secara intensif mengenai kekuatan laut sebagai sebuah konstruksi politik dan militer yang padu. Mahan percaya bahwa abad ke – 17 hingga abad ke – 18, merupakan masa dimana dunia menjadi arena yang didominasi oleh aktivitas perebutan kekuasaan laut yang dilakukan demi mencapai kepentingan ekonomi, politik, dan militer. Maka dari itu, untuk memanfaatkan kekuatan politik dan kontrol di wilayah pesisir, dibutuhkan tekad dan kemauan yang kuat. Hal ini dapat ditempuh melalui kerja sama antarnegara yang tengah berlangsung saat ini di kawasan Indo – Pasifik (Mahan, 1890)

Satu abad berselang, istilah ini disinggung oleh seorang geopolitikawan asal Jerman yang bernama Karl Haushofer, ia menggunakan istilah tersebut pada tahun 1920 hingga 1930 – an dalam karya – karyanya seputar geografi dan geopolitik. Haushofer menjustifikasikan adanya integrasi antara Samudra Hindia dan Samudra

Pasifik yang dikuatkan oleh bukti – bukti dalam bidang biologi laut, etnografi, oseanografi, dan filologi. Haushofer menjelaskan bahwa Indo – Pasifik merupakan visualisasi dari suatu entitas kekuatan kolektif penentang kolonialisme di India dan Republik Rakyat Tiongkok, sebagai sekutu Jerman dalam melawan dominasi maritim yang dikuasai oleh Inggris Raya, AS, dan Eropa Barat (Li, 2020).

Gambar I. 1 Peta Wilayah Indo-Pasifik



Sumber: (Camroux & Jaffrelot, 2021)

Pada tahun 2007, penggunaan istilah ini kembali dipopulerkan oleh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Melalui pidatonya di Parlemen India tentang “*Confluence of the Two Seas*”, Shinzo Abe menyebutkan bahwa pertemuan “*confluence*” antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik merupakan sebuah perpaduan dinamis yang bebas dan makmur di Asia secara lebih luas (mofa.go.jp). Pidato tersebut berfokus pada keamanan jalur maritim yang menjadi penghubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terbitnya makalah tentang keamanan maritim di Indo – Pasifik pada

Januari 2007 yang dirancang oleh Institut Studi dan Analisis Pertahanan (*IDSA*) New Delhi membawa konsep Indo – Pasifik ke dalam domain akademis. Terbitnya makalah ini didasari oleh hasil diskusi antara IDSA dan Institut Urusan Internasional Jepang (*JIIA*) pada Oktober 2006 (Khurana, 2007). Guurpet S. Khurana menjelaskan bahwa konsep Indo – Pasifik merupakan sebuah kerangka geografis yang mencakup Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik yang dihubungkan oleh Asia Tenggara. Konsep ini telah mengalami perkembangan dan penafsiran yang beragam, terutama seiring dengan perubahan orientasi politik dan ekonomi RRT sejak tahun 1980 – an (Herindrasti, 2019). Hingga pada tahun 2010 – an, istilah Indo – Pasifik mulai mendapatkan perhatian yang cukup signifikan dalam pemerintahan India dan sering digunakan oleh para pimpinan politik di India (Scott, 2012).

Sejak tahun 2011, istilah Indo – Pasifik mulai semakin sering digunakan dalam pembahasan mengenai wacana geopolitik (Yamazaki, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa istilah tersebut telah bertransformasi menjadi lebih universal dan mendapatkan perhatian khusus dalam konteks diskusi tentang hubungan geopolitik dalam domain wilayah Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik. Tiga negara besar (Australia, Jepang, dan AS) turut serta memberikan perhatian lebih terhadap Indo – Pasifik. Istilah tersebut seringkali digunakan oleh para analis strategis, pemerintah, pimpinan militer tingkat tinggi di Australia, Jepang, dan AS untuk menjuluki wilayah tersebut.

Keseriusan India, Australia, Jepang, dan AS di kawasan Indo – Pasifik menciptakan sebuah pola yang sama diantara keempat negara tersebut sehingga kesamaan pola tersebut melahirkan suatu kelompok informal di kawasan tersebut yaitu

Dialog Keamanan Kuadrilateral (*QUAD*). *QUAD/QSD* yang secara resmi disebut *Quadrilateral Security Dialogue*, adalah sebuah koalisi yang terdiri dari empat negara demokrasi dengan kondisi perekonomian yang dinamis yaitu AS, Australia, India, dan Jepang. Pada awalnya kerjasama ini hadir sebagai respons dari adanya bencana tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004, namun seiring berjalannya waktu kerjasama ini berlanjut pada ruang lingkup agenda yang lebih luas, mencakup penanganan terhadap masalah keamanan, ekonomi, dan kesehatan (Smith, 2021).

Sebagai salah satu aktor yang memegang peran sentral dan strategis di kawasan ini, Perhimpunan Bangsa – Bangsa Asia Tenggara (*ASEAN*) sepakat bahwa Indo – Pasifik merupakan “*The New Asia*”, hal ini semakin dipertegas dengan dirilisnya pernyataan bersama yang disebut sebagai *ASEAN Outlook on the Indo – Pacific (AOIP)* yang menetapkan wilayah Samudra – Pasifik dan Samudra Hindia sebagai satu wilayah yang saling terhubung yaitu Indo – Pasifik. Meskipun dalam prosesnya diiringi oleh kontroversi seputar penggunaan istilah ini, secara eksplisit, upacara pembukaan KTT *ASEAN* yang diselenggarakan di Bangkok pada tahun 2019 menjadi era terakhir dari konsep Asia – Pasifik dan merupakan upacara sambutan bagi konsep Asia yang baru yaitu Indo – Pasifik. Dengan demikian *ASEAN* mengkonfirmasi penyesuaian perspektif mereka bahwa Indo – Pasifik merupakan istilah geografis bersama untuk wilayah ini. Tak hanya *ASEAN*, aktor lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara Eropa juga ikut serta menyetujui perspektif yang sama dengan *ASEAN*. Di sisi lain, RRT menjadi aktor yang paling kontras dengan penggunaan istilah Indo – Pasifik untuk menjadi sebuah konsep di kawasan tersebut, karena RRT

menganggap bahwa gerakan ini merupakan salah satu upaya penahanan terhadap RRT di kawasan tersebut (Tyler, 2019).

Kawasan Indo – Pasifik terus dihadapi oleh tantangan keamanan yang beragam dan cukup signifikan, diantaranya ialah kehadiran RRT sebagai kekuatan regional baru di kawasan tersebut, perselisihan atas wilayah seperti Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan, serta beberapa konflik yang masih berlangsung seperti di Semenanjung Korea dan Afghanistan. Penjualan barang – barang ilegal, ketidakstabilan kawasan yang diakibatkan oleh penyebaran senjata pemusnah massal (WMD), ekstrimisme, dan kemiskinan memperburuk ketegangan di kawasan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Aliansi Barat yang dipimpin oleh AS dan NATO, dan Aliansi Timur yang dipimpin oleh Rusia, dengan dukungan ekonomi dari RRT, semakin memperumit dinamika kekuasaan di wilayah tersebut. Sikap tegas yang diambil RRT, termasuk klaim atas pulau – pulau yang tengah dipersengketakan menambah ketegangan regional (Sohail, 2022).

Sejak konflik bersenjata di Korea (1950 – 1953), struktur keamanan pada saat itu di wilayah Indo – Pasifik didominasi oleh sistem aliansi bilateral dibawah komando Amerika Serikat, yang dikenal dengan istilah hub and spokes system (HAS). AS memelihara aliansi bilateralnya dengan Australia, Filipina, Thailand, terutama dengan Korea Selatan dan Jepang yang menjadi tempat konsentrasi utama eksistensi militer AS di kawasan tersebut. Namun dimulai sejak 2014, Republik Rakyat Tiongkok dibawah pemerintahan Xi Jinping mengusulkan restrukturisasi sistem keamanan regional dengan menolak untuk menjalin hubungan bilateral dengan AS dan menyebut

aliansi militer yang dinahkodai oleh AS itu sebagai peninggalan Perang Dingin. Hal ini mencakup peningkatan militerisasi Laut Tiongkok Selatan, ekspansi kemitraan keamanan bilateral, dan pendirian forum keamanan multilateral *Shanghai Cooperation Organisation (SCO)*. AS merespons hal ini dengan melakukan pengembangan konsep Indo – Pasifik Bebas dan Terbuka (*FOIP*) sebagai penyeimbang pengaruh RRT di kawasan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah aktor regional termasuk *ASEAN*, Australia India, dan beberapa negara anggota Uni Eropa, juga mengembangkan strategi Indo – Pasifik mereka sendiri. Di sisi lain, RRT menolak konsep ini karena mereka memandang konsep tersebut sebagai sebuah bentuk strategi pembatasan yang ditujukan kepada mereka sendiri di bawah komando AS. Hal ini menandakan pergeseran dinamika keaman di kawasan tersebut menuju persaingan yang lebih kompleks antara AS dan RRT (Heiduk, 2022).

Wilayah Indo – Pasifik merupakan pusat geopolitik maritim yang cukup krusial. Secara ekonomi, wilayah ini memiliki stok ikan terbesar di dunia, jalur perdagangan maritim krusial, dan berkontribusi terhadap (Produk Domestik Bruto) PDB global. Secara demografis, wilayah ini memiliki kontemplasi kota metropolitan terbesar dan tingkat populasi terpadat di dunia. Secara strategis, wilayah ini menjadi daya tarik bagi kekuatan aktor regional dan internasional sehingga mempengaruhi dinamika keamanan di perairan regional kawasan tersebut (Valenti, 2022)

Kawasan biogeografis di zona Indo – Pasifik mempunyai keanekaragaman fauna yang paling melimpah di dunia. Sekitar hampir 4.000 spesies ikan pesisir yang sebagian besarnya hidup di terumbu karang terdapat di kawasan ini (Aquarium La

Rochelle). Diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa sepuluh besar negara dengan jumlah penangkapan ikan terbesar di dunia didominasi oleh negara – negara Asia, dengan RRT berada di posisi pertama, disusul oleh Indonesia, India, Vietnam, Bangladesh, Korea Selatan, Filipina, Norwegia, Mesir, dan Chili (Remonté, 2023).

Sebesar 40% ekspor global sebesar berasal dari wilayah ini dan sekitar 32,2 juta barel minyak mentah melewati wilayah ini setiap tahunnya, jumlah dan presentase tersebut diperkirakan mengalami peningkatan di setiap tahunnya (Tertia & Perwita, 2018). Pada tahun 2020, lebih dari 50% dari total PDB global dikuasai oleh enam ekonomi terbesar di kawasan ini. Berdasarkan PDB, AS, RRT, dan Jepang menjadi tiga besar ekonomi teratas di dunia, dengan India menempati posisi keenam, Korea Selatan di posisi kesepuluh, dan disusul oleh Australia (World Bank). Aktivitas ekonomi di kawasan Indo – Pasifik meningkat sebesar 10% dan kini diperkirakan telah menyumbang sekitar 60% PDB global (Nasution, 2024).

Dengan semakin padatnya aktivitas ekonomi dan politik di kawasan Indo – Pasifik, kendali atas kawasan Indo – Pasifik sangat berpengaruh terhadap kekuatan dan kekuasaan suatu negara, hal ini dikarenakan ketergantungan ekonomi dan keamanan global di kawasan ini yang sangat besar. Indo – Pasifik menjadi magnet yang mampu menarik setiap negara untuk memenuhi kepentingan ekonominya, seperti industri, pasokan sumber daya, dan kegiatan perdagangan luar negeri jalur maritim. AS, Jepang, India, dan Australia, serta beberapa negara di Asia Tenggara, menginginkan adanya kebebasan navigasi sebagai bagian dari kepentingan strategis mereka, namun respon ofensif dari RRT dianggap sebagai abnormalitas yang terjadi di kawasan tersebut.

Keberagaman nilai dan fungsi strategis Indo – Pasifik mengekspos ruang bagi perbedaan kepentingan yang dapat mengakibatkan konflik, baik dalam hubungan antar negara yang dinamis maupun intensitas konflik politik – militer yang semakin terbuka lebar (Nashir, Komeini, & Abdurofiq, 2022).

Hadirnya RRT sebagai sebuah entitas kepemimpinan baru di Laut Tiongkok Selatan mengakibatkan terjadinya sengketa perbatasan diantara negara – negara Asia Tenggara. Di sisi lain, sebagai bentuk responsibilitas, AS melakukan peningkatan kerja sama regional dengan Australia, Jepang, Korea Selatan, India, Selandia Baru, dan negara – negara di Asia Tenggara yang berada dibawah naungan kebijakan Rebalance. AS juga melakukan pendekatan melalui tindakan preventif dalam mengatasi aktivitas pengembangan *WMD* milik Korea Utara dan meningkatnya kemampuan militer RRT (Peters, 2014). Ancaman di kawasan Indo – Pasifik berevolusi menjadi rivalitas dua kekuatan superpower yang berkepentingan di wilayah tersebut. Tidak hanya persaingan dalam sektor ekonomi, persaingan antara AS dan RRT juga turut andil dalam mempengaruhi stabilitas dan keamanan di area perbatasan seperti sengketa di Laut Tiongkok Selatan dan Taiwan, serta konflik di Semenanjung Korea (Yanuarti, Wibisono, & Midhio, 2020).

RRT terus melakukan peningkatan jumlah anggaran belanja pada sektor militer yang ditujukan untuk renovasi teknologi dan peningkatan kapasitas dalam melaksanakan denial strategy terhadap konsep AS di kawasan tersebut. Menurut laporan Departemen Pertahanan AS yang dirilis pada tahun 2021, RRT memiliki angkatan laut terbesar di dunia saat ini dengan 355 kapal dan diperkirakan akan

meningkat menjadi 420 kapal pada tahun 2025 dan 460 kapal pada tahun 2030. Kapal – kapal ini meliputi kapal perang, kapal selam, kapal induk, dan kapal amfibi. RRT juga mendanai milisi maritim di Laut Tiongkok Selatan dengan sekitar 120 kapal untuk mendukung ambisi teritorialnya (Jochheim & Lobo, 2023).

Secara keseluruhan, tantangan keamanan tradisional yang menyelubungi kawasan tersebut diantaranya mencakup sengketa teritorial dan klaim maritim yang berkelanjutan, terutama di LTS, yang dapat memicu ketegangan hingga konflik militer. Modernisasi militer dan proyeksi kekuatan dari berbagai negara menimbulkan kekhawatiran akan ketidakseimbangan kekuatan dan potensi perlombaan senjata (*arm race*), sementara proliferasi senjata non – konvensional seperti nuklir di negara – negara seperti RRT, India, dan Pakistan melahirkan ancaman berupa ketidakseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Konflik lintas batas, seperti di Afghanistan, menimbulkan ancaman keamanan berupa kekerasan dan pergerakan ekstrimis, serta masalah teritorial di Laut Tiongkok Timur yang didorong oleh persaingan sejarah dan nasionalisme, yaitu sengketa antara RRT dan Jepang atas pulau – pulau di Kepulauan Senkaku dan Diayou (Sahu, 2023).

Selain isu tradisional yang cukup kental, adapun isu – isu non – tradisional yang berkembang di kawasan Indo – Pasifik meliputi ancaman *cyber* seperti spionase dan serangan ransomware, kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia dan senjata, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang mengancam komunitas di pesisir dan keanekaragaman hayati, serta pandemi seperti COVID – 19 yang menyoroti kebutuhan akan adanya keamanan kesehatan di kawasan tersebut. Istilah “keamanan maritim”

sendiri hadir dalam dokumen – dokumen yang dikeluarkan oleh Proses Konsultatif Informal Perserikatan Bangsa – Bangsa (*ICP*) sejak tahun 2001. Ancaman – ancaman tersebut memberikan dampak pada stabilitas, keamanan, dan kenyamanan di kawasan Indo – Pasifik, termasuk juga faktor militer yang bisa menyebabkan kekerasan hingga kontak senjata (Keliat, 2009 & Sahu, 2023).

Menjaga stabilitas keamanan di kawasan Indo – Pasifik merupakan hal yang sangat penting, karena kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi, politik, dan militer yang signifikan di tingkat global seperti yang telah dijelaskan diatas sebelumnya. Kawasan yang menjadi arena negara – negara besar ini menjadi penyumbang sebagian besar pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi keamanan yang stabil menghadirkan aktivitas perdagangan dan investasi yang lancar, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi regional dan global. Selain itu, mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan ini berarti melindungi jalur pelayaran vital yang merupakan *lifeline* perdagangan dunia. Tertia dan Perwita menyarankan serta mengaksentuasikan bahwa perlu adanya kerja sama keamanan maritim yang komprehensif untuk menjaga stabilitas, menyoroti sengketa maritim, serta peran aktor – aktor yang berpengaruh untuk mengatasi ancaman tradisional maupun non – tradisional di kawasan tersebut (Tertia & Perwita, 2018).

Sistem internasional penuh dengan perubahan dan dinamika yang sulit diprediksi. Ancaman tradisional dan non – tradisional, ditambah rasa tidak percaya antar negara, meningkatkan potensi lahirnya suatu konflik. Kerja sama menjadi sebuah solusi penting sebagai media untuk meredakan ketegangan dan mengalihkan fokus

negara pada upaya mensejahterakan rakyatnya. . Baik berupa kerja sama bilateral maupun multilateral , serta penggunaan konsep kawasan, berperan penting dalam menjaga stabilitas regional dan mendorong kemajuan ekonomi bersama (Yusro, Sinaga, & Darmawan, 2020).

Bagi negara – negara besar di kawasan Indo – Pasifik seperti Jepang dan Australia, kondisi ini tentu dapat mengancam keamanan nasional serta kepentingan nasional mereka. Sebagai respon dalam menghadapi situasi yang cukup pelik ini Jepang dan Australia berkomitmen untuk menghadirkan kembali stabilitas kawasan Indo – Pasifik. Jepang dan Australia menjadi aktor yang memainkan peran penting dan signifikan dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Indo – Pasifik.

Sebagai negara yang masuk kedalam lima besar negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, tentunya Jepang berusaha untuk menjaga kepentingan besar mereka dalam menjaga jalur perdagangan maritim yang aman dan bebas dari segala bentuk hambatan (Ahdiat, 2023). Ketergantungan Jepang terhadap sektor impor dan ekspor yang menjadikan keamanan jalur lintas laut menjadi hal yang penting bagi Jepang. Oleh karena itu, Jepang bergerak aktif dalam menciptakan lingkungan keamanan yang kondusif melalui kerja sama regional dan aliansi strategis. Hal ini didukung upaya kementerian pertahanan Jepang untuk menghadirkan kawasan Indo – Pasifik yang bebas dan terbuka yaitu *Free and Open Indo – Pacific (FOIP)*. Gagasan ini diutarakan oleh Shinzo Abe dalam pidatonya di *Tokyo International Conference on African Development (TICAD) VI* di Kenya pada tahun 2016. Visi ini bertujuan untuk memperkuat “konektivitas” antara Asia dan Afrika melalui konsep Indo – Pasifik yang

bebas dan terbuka, serta mendorong stabilitas dan kemakmuran di seluruh kawasan tersebut. *FOIP* sendiri terdiri dari tiga pilar utama yaitu:

1. Mempromosikan dan menegakkan prinsip – prinsip supremasi hukum, kebebasan navigasi, perdagangan bebas, dll.
2. Mendorong kemakmuran ekonomi melalui peningkatan konektivitas.
3. Menjamin perdamaian dan stabilitas (mod.go.jp)

Tiga pilar tersebut menjadi penopang utama Jepang dalam merealisasikan visinya di Indo – Pasifik. Kementerian Pertahanan Jepang menekankan perlu adanya kewaspadaan terhadap dinamisnya perubahan dan berbagai bentuk ancaman yang terjadi di kawasan Indo Pasifik. Jepang juga menekankan bahwa upaya – upaya ini akan diraih melalui kerja sama dengan seluruh negara baik bilateral maupun multilateral agar stabilitas keamanan di kawasan Indo – Pasifik tetap terjaga. Dengan terstrukturinya visi Jepang di kawasan Indo – Pasifik, negara ini dianggap sebagai kontributor tatanan berbasis aturan di kawasan Indo – Pasifik (Wilkins, 2021).

Australia memiliki posisi geografis yang strategis di kawasan Indo – Pasifik. Sejak masih berada di bawah kekuasaan kolonia Inggris, administrasi kolonial Australia telah memiliki tujuan untuk menjadikan Australia sebagai kekuatan regional yang berpengaruh di kawasan Pasifik, terutama di Pasifik Selatan. Kawasan Pasifik Selatan dikenal akan kekayaan alam yang melimpah, mulai dari beragam biota laut, cadangan minyak bumi baik yang telah ditemukan atau yang belum dieksplorasi, hingga kekayaan mineral tersembunyi di bawah permukaan bumi pasifik. Dengan meluasnya

pengaruh Australia di kawasan Pasifik, menjadikan negara ini memiliki bargaining power yang besar di wilayah tersebut (El – Haq & El – Islam, 2020). Kawasan Pasifik menjadi kawasan yang menggiurkan untuk dapat dikuasai, maka dari itu sebagai pelindung Pasifik Australia memberikan perhatian khususnya terhadap wilayah tersebut dari pengaruh – pengaruh eksternal yang dapat merusak stabilitas tatanan di kawasan tersebut. Sebagai negara yang berkomitmen terhadap keamanan regional, Australia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan dari adanya berbagai bentuk potensi ancaman. Australia juga memiliki peran penting dalam keamanan regional di tengah meningkatnya ketegangan antara kekuatan besar di Indo – Pasifik. Terkandung dalam *Foreign Policy White Paper*, negara ini juga mengupayakan kerja sama ekonomi dan keamanan dengan negara – negara demokrasi di kawasan Indo – Pasifik (dfat.gov.au).

Hubungan bilateral antara Jepang dan Australia telah lama dibangun dengan dasar awal di atas kerja sama ekonomi yang kuat. Sejak tahun 1957 melalui *Agreement on Commerce between the Commonwealth of Australia and Japan* yang ditandatangani oleh, kedua negara menjalin hubungan perdagangan yang erat, dengan Jepang menjadi salah satu mitra dagang terbesar bagi Australia (Wade, 2021). Hubungan ekonomi ini kian diperdalam dengan berbagai perjanjian perdagangan dan investasi yang menjadi pilar pendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Sebagai contoh, Jepang menjadi tujuan utama ekspor komoditas Australia seperti batu bara, bijih besi, serta produk pertanian, sementara Jepang mengeksport produk – produk

manufaktur dan teknologi tinggi ke Australia (tradingeconomics.com, 2024). Kemitraan ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan saling ketergantungan yang semakin memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Tercatat sejak tahun 1970 – an, hubungan bilateral Jepang dan Australia mulai merambah kedalam kawasan keamanan dengan mempererat hubungan strategis mereka melalui inisiatif – inisiatif keamanan. Kerja sama keamanan antara Jepang dan Australia dalam sektor militer dimulai secara rahasia pada pertengahan tahun 1970 – an atas inisiatif dari *Australian Secret Intelligence Service (ASIS)*. Pada awalnya, kerja sama ini hanya terbatas pada pertukaran intelejen rahasia masing – masing negara selama lebih dari sepuluh tahun. Hingga pada awal 1990 – an, cakupannya mulai semakin diperluas yakni mencakup kunjungan timbal balik masing – masing pejabat senior pertahanan, dialog resmi tentang masalah keamanan, dan kerja sama maritim, yang semuanya dilakukan dengan terstruktur dan sangat hati – hati. Hubungan keamanan ini semakin diperkuat setelah terjadinya serangan teroris di AS pada 11 September 2001, dengan meningkatkan aktivitas kerja sama yang didorong oleh hubungan masing – masing negara dengan AS, juga termasuk perang menghadapi teror dan proliferasi senjata pemusnah massal (Ball, 2006).

Baik Jepang maupun Australia memandang kerja sama keamanan sebagai langkah penting dalam menjaga stabilitas kawasan Indo – Pasifik. Jepang, sebagai negara maritim yang mengandalkan perdagangan internasional, memiliki kepentingan strategis dalam menjaga keamanan regional. Ancaman keamanan seperti terorisme,

proliferasi nuklir, dan perselisihan teritorial mendorong Jepang untuk memperkuat kerja sama dengan Australia. Di sisi lain, Australia yang juga mempunyai wilayah maritime luas, memiliki kepentingan besar dalam menjaga keamanan laut. Kebangkitan kekuatan militer RRT di kawasan Indo – Pasifik mendorong Australia untuk meningkatkan kerja sama dengan negara demokrasi lain dalam menjaga keseimbangan kekuatan. Kerja sama yang dilakukan dengan Jepang memungkinkan Australia untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya, termasuk melalui latihan bersama, pertukaran personel, dan kerja sama intelejen. Selain ini berkontribusi pada stabilitas regional, kedua negara juga memiliki tujuan untuk tetap menjaga aliansi dengan AS sebagai mitra pertahanan di kawasan.

Di samping hubungan ekonomi yang erat, kedua negara juga menyadari pentingnya memperkuat kerja sama keamanan untuk menghadapi tantangan regional yang semakin kompleks. Secara tidak langsung, hubungan ekonomi kedua negara menjadi jalur pembuka bagi mereka untuk memperkuat kemitraan strategis yang lainnya khususnya pada sektor keamanan kedua negara. Dalam menghadapi ancaman – ancaman yang ada, Jepang dan Australia melihat perlunya penyusunan strategi untuk memperkuat aliansi strategis mereka dengan tujuan untuk memastikan stabilitas dan keamanan di kawasan Indo – Pasifik.

Dimulai sejak berakhirnya Perang Dingin, kerja sama Jepang – Australia di bidang keamanan telah menjelma menjadi lebih kuat dibandingkan dengan kerja sama lainnya bersama sekutu ataupun negara mitra non – AS. Kerja sama Jepang dan

Australia pada awalnya hanya berkuat dengan persoalan keamanan non – tradisional hingga kemudian kemitraan strategis Tokyo – Canberra berevolusi menjadi kerja sama yang lebih bernuansa aliansi kerja sama strategis dengan mengangkat asumsi konflik keamanan tradisional tingkat tinggi (Satake, 2023).

Dengan adanya kesamaan tujuan dan tantangan yang dihadapi oleh Jepang dan Australia menjadikan hubungan bilateral kedua negara berkembang menjadi kemitraan yang sangat beragam dan menyeluruh, terutama pada sektor vital yaitu tujuan politik dan keamanan dalam konteks ini yaitu kawasan Indo – Pasifik. Percepatan perubahan hubungan Australia dan Jepang semakin memperkuat hubungan keamanan mereka menjadi salah satu hubungan bilateral yang terinstitusionalisasi di wilayah Asia – Pasifik. Pada tahun 2007 mereka mengadopsi *Joint Declaration on Security Cooperation (JDSC)* yang menandai hubungan ini akan berjalan menuju kemitraan strategis. *JDSC* secara resmi disepakati pada 13 Maret tahun 2007 dan ditandatangani oleh Perdana Menteri Jepang dan Australia yang menjabat pada saat itu, yaitu Shinzo Abe dan John Howard. Deklarasi ini mencakup berbagai bidang kerja sama, termasuk pertukaran intelejen, latihan militer bersama, keamanan maritime, serta penanggulangan bencana (mofa.go.jp, 2007). *JDSC* merupakan langkah penting dalam memperkuat kerja sama antara kedua negara, terutama dalam menghadapi ancaman keamanan yang kompleks dan dinamis di kawasan Indo – pasifik.

Pada tanggal 22 Oktober 2022 *JDSC* mengalami pembaharuan yang secara resmi ditandatangani oleh perwakilan kedua pihak melalui Perdana Menteri masing-masing negara, Fumio Kishida dan Anthony Albanese. Pembaharuan ini berisikan

tentang upaya Jepang dan Australia untuk lebih memperdalam dan memperluas kerja sama keamanan dan pertahanan, termasuk dalam proses pengidentifikasian upaya untuk meningkatkan keefektifan dalam proses berbagi informasi, koordinasi dan penggunaan peralatan yang kompatibel, mencakup perluasan pelatihan militer kedua negara (japan.embassy.gov.au).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang yang sudah peneliti paparkan diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan peneliti coba untuk menjawabnya yaitu: **“Bagaimana pengaruh kerja sama Jepang-Australia melalui Joint Declaration on Security Cooperation terhadap stabilitas keamanan Indo-Pasifik?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memerhatikan dinamika keamanan kawasan Indo – Pasifik dengan penekanan terhadap aliansi kerja sama keamanan bilateral Jepang dan Australia melalui *Joint Declaration on Security Cooperation* dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan tersebut. Analisis terbatas pada periode implementasi perjanjian (2022 – 2023), dan bagaimana dampak relevannya terhadap dinamika keamanan di kawasan Indo – Pasifik. Fokus penelitian juga meliputi bagaimana kepentingan Jepang dan Australia dalam aliansi ini, mencakup aspek keamanan nasional, politik, strategis, dan militer yang direalisasikan melalui implementasi perjanjian dan bagaimana dampaknya terhadap kebijakan luar negeri kedua negara. Juga diiringi dengan evaluasi terhadap

efektivitas aliansi keamanan ini dalam upayanya untuk mengatasi ancaman – ancaman keamanan wilayah Indo – Pasifik.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kerja sama Jepang – Australia *Joint Declaration on Security Cooperation* sebagai salah satu upaya dalam membangun keamanan regional di kawasan Indo – Pasifik.
2. Untuk mengetahui efektivitas *Joint Declaration on Security Cooperation* yang dibangun oleh Jepang – Australia dalam menciptakan kestabilan keamanan di kawasan Indo – Pasifik.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala aliansi keamanan bilateral yang dihadapi oleh Jepang – Australia ini dalam proses implementasinya.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam mata kuliah Skripsi di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.
2. Untuk memberikan sumbangan pada literatur akademis mengenai terkhusus mengenai sektor kejasama keamanan bilateral.
3. Untuk menambah wawasan kepada masyarakat luas secara umum dan khususnya bagi para akademisi Hubungan Internasional mengenai aliansi keamanan bilateral yang berguna bagi kebutuhan penelitian selanjutnya.